

Jumhur Ulama (imam empat Madzhab) membolehkan, mereka menyatakan bahwa berwasiat kepada ahl waris itu hukumnya boleh apabila para ahli waris mengizinkan.

Pendapat jumhur ulama ini setelah melalui ijtihad intiqā'i ternyata dipandang lebih rajih, sehingga pendapat jumhur ulama itu telah dijadikan dasar peraturan Kompilasi Hukum Islam yang dituangkan dalam pasal 195 ayat 3.

b. Wasiat kepada pembunuh pewasiat.

Menurut hukum kewarisan Islam bahwa seseorang yang membunuh pewaris tidak berhak atas harta peninggalannya, demikian juga dalam hukum wasiat, dapat dipandang suatu hal yang sangat logis apabila penerima wasiat membunuh pewasiat, maka ia tidak berhak menerima wasia.

Dalam hal ini ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ketentuan ini diterapkan dengan sangat ketat, sehingga pembunuh orang yang berwasiat tidak akan dapat menerima wasiat baik itu terjadi karena pembunuh sengaja atau tidak sengaja.

c. Wasiat kepada orang yang tidak ada pada waktu pewasiat meninggal, maka wasiat tersebut adalah batal apabila dilihat unsur kehadiran penerima wasiat pada waktu wasiat itu dibuat, sebab kehadiran itu merupakan syarat sahnya wasiat.

- b. Hak-hak kebendaan, seperti hak mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan.
 - c. Hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak syuf'ah atau hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan.
 - d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh orang yang meninggal dunia, barang yang telah dibeli orang yang telah meninggal dunia sewaktu masih hidup yang sudah dibayar harganya tetapi barangnya belum diterima.
4. Shîghat artinya ijab (pernyataan) dan qabul (penerimaan) wasiat.

Shîghat wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh seseorang yang akan berwasiat dan atau penerima wasiat. Shîghat wasiat sendiri terdiri dari "ijab" dan "qabul". Ijab ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang berwasiat, sedangkan qabul ialah kata-kata atau pernyataan yang ucapkan oleh seseorang yang menerima wasiat, sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya. Semua yang mengandung pengertian bahwa orang yang berwasiat menyatakan memberikan sesuatu kepada pihak yang lain dan pelaksanaan pemilikan dari pemberian itu baru dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia, maka keadaan yang demikian dapat diterima sebagai shîghat wasiat. Sehingga shîghat wasiat dapat berupa perkataan dan dapat berupa isyarat.

Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh madzhab membutuhkan izin dari para ahli waris. Jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku. Tetapi jika mereka menolak, maka batallah wasiat itu. Sekalipun ahli waris telah menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga harta peninggalan tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Izin ahli waris itu harus bersumber dari ahli waris yang telah cakap bertindak hukum, yaitu yang sudah baligh dan berakal serta mengetahui adanya wasiat tersebut. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan wasiat dari ahli waris yang belum atau tidak cakap bertindak hukum tidak sah.
- b. Izin atau kebolehan dari para ahli waris tersebut diungkapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan dari ahli waris sewaktu pewasiat masih hidup tidak sah. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa izin mereka hanya bersifat semu atau sementara demi menjaga perasaan pewasiat.

Wasiat tidak boleh dilaksanakan sebelum hutang-hutang orang yang berwasiat dilunasi atau dibebaskan dari beban hutang. Jadi jumlah sepertiga harta warisan yang dikeluarkan untuk wasiat itu tidak termasuk hutang. Madzhab Syafi'iyah mengatakan jumlah sepertiga itu dihitung pada saat meninggalnya orang yang berwasiat.

Apabila pewasiat mempunyai kewajiban zakat, kafarat, haji atau kewajiban-kewajiban lain yang menyangkut harta, maka kewajiban tersebut

2. Pewasiat kehilangan kecakapan bertindak hukum karena kurang ingatan atau gila dan sampai meninggalnya tetap dalam keadaan gila.
3. Pewasiat ketika meninggal banyak memiliki hutang sehingga menghabiskan harta peninggalannya tersebut.
4. Orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat.
5. Barang yang diwasiatkan musnah (hilang, terbakar atau hancur dikarenakan banjir) sebelum yang berwasiat meninggal dunia.
6. Orang yang diberi wasiat membunuh pewasiat.
7. Orang yang diberi wasiat menolak wasiat yang akan diberikan kepadanya.
8. Barang yang diwasiatkan keluar dari milik pewasiat sebelum meninggal dunia (bukan hak milik pewasiat lagi), meskipun pada akhirnya kembali lagi menjadi milik pewasiat.
9. Syarat yang ditentukan dalam wasiat tidak terpenuhi. Misalnya pewasiat mengatakan: apabila sakit saya ini membawa pada kematian, maka saya wasiatkan sepertiga dari harta saya ini kepada Fulan. Tetapi ternyata pewasiat sembuh dari sakitnya dan tidak jadi meninggal dunia, maka wasiat yang telah diucapkannya menjadi batal.

Suatu wasiat dapat dicabut oleh pewasiat tanpa memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari orang atau badan yang akan diberi wasiat, seperti:

1. Pewasiat menjual harta yang diwasiatkannya kepada orang lain.
2. Pewasiat mengalihkan wasiatnya kepada orang lain.
3. Pewasiat menambah, mengurangi atau menukar harta yang diwasiatkannya.

Setelah memperhatikan hal-hal yang membatalkan wasiat di atas, maka dapat dipahami bahwa wasiat merupakan perjanjian sepihak. Sehingga sewaktu-waktu pemberi wasiat bisa menarik kembali harta wasiatnya atau sebaliknya penerima wasiat menolak wasiat atau membatalkan wasiat yang pernah dibuat untuknya. Juga karena wasiat merupakan perjanjian sepihak maka wasiat itu dibuat oleh seseorang yang sudah cakap sebagai subjek hukum, sebab wasiat yang dibuat oleh orang yang gila atau rusak akalnya (mabuk) adalah batal.³⁹

³⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat 1